

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dalam penelitian ini telah dipaparkan mengenai Upaya yang dilakukan UNICEF dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak di Sulawesi Selatan melalui program Penanganan Anak Tidak Sekolah dan PAUD HI khususnya di Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023. Melalui pemaparan yang dilakukan bisa disimpulkan bahwa pendidikan adalah salah satu komponen utama dalam mewujudkan kemajuan serta pembangunan sebuah negara. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan berkualitas yang inklusif mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai aset penting dalam kesuksesan sebuah negara. Akan tetapi, kondisi yang sebenarnya memperlihatkan masih belum meratanya pembangunan pendidikan secara keseluruhan di Indonesia sehingga dapat menghambat tujuan serta cita-cita nasional dan global yang ingin dicapai.

Pada tahun 2021, terdapat sekitar 9,1 juta jiwa di Provinsi Sulawesi Selatan sehingga menjadikannya sebagai provinsi dengan total penduduk paling banyak ke-7 di Indonesia. Namun bersamaan dengan banyaknya penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, provinsi tersebut juga menduduki posisi ke-5 dengan jumlah APTS terbanyak di Indonesia. Selain itu, partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini di Sulawesi Selatan pun masih sangat rendah di mana pada tahun 2021 jumlah APK hanya mencapai 30,45%. Banyak alasan yang melatarbelakangi rendahnya akses terhadap pendidikan di provinsi tersebut seperti masalah ekonomi keluarga, kurangnya motivasi anak, orang tua yang tidak begitu menganggap penting pendidikan terutama pada jenjang PAUD, keterbatasan akses khususnya untuk yang berada di daerah pedalaman, hingga budaya seperti pernikahan anak. Akses pendidikan yang masih rendah ini dibarengi dengan kualitas pembelajaran yang mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19 khususnya pada hasil pembelajaran dasar seperti literasi dan numerasi.

Kondisi tersebut menyebabkan adanya kebutuhan bagi Provinsi Selatan untuk melibatkan aktor yang memang di bidang terkait seperti UNICEF melalui program-program khusus untuk menangani persoalan yang ada. Selama periode

2021-2023, UNICEF bersama para mitranya telah mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak dengan mengembangkan program Penanganan Anak Tidak Sekolah (PATS) khususnya di Kabupaten Bone dan Takalar dan program PAUD HI khususnya di Kabupaten Bone dan Bantaeng. Berbagai upaya yang dilakukan UNICEF telah memperlihatkan bahwa UNICEF telah menjalankan fungsi-fungsinya sebagai organisasi internasional menurut pandangan Clive Archer, diantaranya adalah artikulasi dan agregasi, norma, sosialisasi, informasi, dan operasional berdasarkan nilai-nilai pada Kovensi Hak Anak sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini.

UNICEF telah berkontribusi dalam mengembangkan program PATS melalui Gerakan Kembali Bersekolah secara lokal di Kabupaten Bone dan Takalar yaitu Gerakan Lissu Massikolah dan Gerakan Ayo Kembali Bersekolah. UNICEF juga telah membantu merealisasikan Program Lingkar Remaja sebagai alternatif untuk anak tidak sekolah yang memilih belajar kembali di pendidikan non formal seperti PKBM sehingga selain mengembalikan anak ke sekolah, kegiatan dan mutu dari hasil pembelajarannya juga dapat diperhatikan.

Upaya yang dilakukan UNICEF ini bukan hanya berfokus pada pengembangan para siswa saja, melainkan juga meningkatkan kapasitas pemerintah dan tenaga pendidik hingga kesadaran orang tua melalui berbagai pelatihan seperti penguatan pendataan, pembuatan modul, peningkatan metode pengajaran berkualitas, dan penyuluhan pentingnya pendidikan sehingga program dapat berjalan secara menyeluruh, sistematis, serta berkelanjutan. Secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan, UNICEF telah mendampingi pemerintah dalam menyusun berbagai regulasi kebijakan seperti Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah beserta Dokumen Rencana Aksi PPATS yang kemudian diadopsi di berbagai kabupaten/kota untuk periode 2021-2023.

Begitu pula pada penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang dilakukan di Kabupaten Bone dan Bantaeng. Dengan bantuan yang diberikan UNICEF melalui program PAUD HI telah dilakukan berbagai pelatihan kepada guru PAUD untuk meningkatkan kualitas pengajaran seperti dalam menyediakan metode pembelajaran melalui bermain,

meningkatkan pemahaman terhadap psikososial dan kesehatan mental sehingga tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja sesuai tujuan dari adanya program PAUD HI itu sendiri. Pelatihan juga ditujukan kepada para orang tua agar dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam memberikan pendampingan langsung kepada anak dan menyediakan bahan-bahan bacaan di rumah. Selain itu, UNICEF turut membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun Peraturan Gubernur No.5 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan PAUD HI, Buku Panduan Penyelenggaraan PAUD HI, hingga pembentukan gugus tugas PAUD HI.

Maka dari itu, UNICEF telah menjalankan fungsinya sebagai organisasi internasional menurut Clive Archer untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak dari segi akses dan kualitas di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2021-2023. Meskipun selama pelaksanaannya masih ditemukan tantangan-tantangan tertentu yang harus ditangani demi mendapatkan hasil secara optimal. Program-program tersebut adalah langkah penting untuk mencapai komitmen UNICEF dan Pemerintah Indonesia baik secara nasional maupun global yang tentunya mengacu pada Konvensi Hak Anak sebagai landasan pemenuhan hak anak atas pendidikan.

## **6.2 Saran**

Terkait dengan upaya yang dilakukan UNICEF untuk meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak dari segi akses dan kualitas di Provinsi Sulawesi Selatan, penulis mengapresiasi segala bentuk keputusan dan tindakan yang sudah dilakukan. Akan tetapi, demi mewujudkan tujuan dalam mengoptimalkan akses serta kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan target-target nasional dan global yang telah ditetapkan, maka penulis akan memberikan saran dan masukan sesuai dengan analisis pada penelitian ini. Penulis berusaha untuk menyediakan saran-saran yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk memperluas serta meningkatkan akses dan kualitas dalam bidang pendidikan untuk anak, terutama dalam konteks upaya yang dilakukan UNICEF dalam mendukung pemerintah Indonesia.

### **6.2.1 Saran Praktis**

Dalam hal pemenuhan hak-hak pendidikan bagi anak, pemerintah pusat dan provinsi perlu meningkatkan pelatihan untuk penguatan kapasitas bagi seluruh

pelaksana program. Misalnya bagi pemerintah provinsi untuk memperbanyak pelatihan di tingkat kabupaten/kota, seperti kepada para pejabat daerah beserta staf-staf yang terkait dan juga para pendidik. Pemerintah provinsi perlu meningkatkan bimbingan teknis untuk pemerintah kabupaten/kota terkait dengan kebijakan-kebijakan apa saja yang diperlukan untuk menyamakan pemahaman dalam pengimplementasian dan pencapaian yang ingin dicapai agar sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu di daerah tersebut. Hal ini diperlukan untuk mencapai tingkat keberhasilan yang merata antar setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan strategi program-program pendidikan yang ada. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah secara intensif perlu menciptakan kebijakan dan inovasi baru yang lebih tepat dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat dari daerah perkotaan hingga pelosok.

Kemudian, untuk UNICEF yang merupakan aktor penting dalam keberlangsungan pemenuhan pendidikan bagi anak khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, dapat lebih memperluas kolaborasi bersama lembaga-lembaga internasional dan lokal serta sektor swasta untuk meningkatkan dukungan dan pendanaan pada program-program yang dijalankan. Semakin meluasnya kemitraan yang dijalin oleh UNICEF pastinya dapat mempercepat tercapainya target-target pendidikan yang berlaku serta menjangkau masyarakat secara menyeluruh hingga ke pelosok. Dengan begitu tentunya dampak positif yang diberikan akan lebih merata dan dapat mengurangi kesenjangan penerima manfaat.

### **6.2.2 Saran Teoritis**

Penulis menyarankan supaya mahasiswa Hubungan Internasional bisa menjalankan penelitian lebih lanjut lagi mengenai persoalan pendidikan. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan berkualitas akan melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan akan membuat sebuah negara dapat berkembang lebih pesat sehingga diperlukan penelitian secara mendalam terkait peningkatan akses dan kualitas pendidikan di sebuah negara atau secara spesifik di daerah-daerah tertentu.

Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori organisasi internasional milik Clive Archer telah membantu penulis dalam menganalisis dan menjawab rumusan masalah pada penelitian ini ya apa saja upaya yang sudah dilakukan UNICEF dalam meningkatkan pemenuhan hak pendidikan anak di

Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2021-2023. Hal ini dikarenakan setiap upaya serta kegiatan UNICEF yang diperoleh penulis baik melalui wawancara maupun berbagai studi literatur sudah tercakup dan dapat dijelaskan melalui fungsi-fungsi organisasi internasional milik Clive Archer dengan cukup baik. Maka dari itu, penelitian selanjutnya dapat lebih berfokus pada efektivitas dari kontribusi UNICEF terhadap pemenuhan hak pendidikan anak melalui program-programnya menggunakan teori efektivitas organisasi internasional. Dengan begitu diharapkan dapat melengkapi penelitian ini untuk menyajikan informasi lebih lanjut mengenai dampak serta pengaruh keterlibatan organisasi internasional seperti UNICEF dalam memastikan kesejahteraan anak.